BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara pria dan seorang wanita yang sah, di akui secara agama dan negara sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawadda warahmah, hal ini selaras dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syariat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Selain yang disebutkan dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan juga mempunyai tujuan

¹ Wantjik Saleh, *Himpunan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1974), hlm. 87

yang lain, di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Rahmat Hakim menegaskan bahwa pernikahan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu *maqasid asy-syari'ah*, yaitu memelihara keturunan atau *hifdzun-nasl*.²

Dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas dan saleh, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Tugas ini memerlukan keseriusan dan kesinambungan dan harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu itu. Begitu penting kesungguhan dan kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal itu mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum Islam. Secara serius para Ulama masa silam mengkaji berbagai aspek berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap anak, dari waktu ia lahir, bahkan dari waktu dalam kandungan, sampai ia dapat mandiri dalam kehidupan. Hak-hak seorang anak, dibicarakan secara detail dalam buku-buku fikih klasik.³ Adapun salah satu hak anak tersebut adalah hak memperoleh nafkah dari orang tuanya.

Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza dalam kitab *Fathul Qarib al-Mujib* menjelaskan pengertian nafkah adalah berasal dari kata *infâq* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 146.

³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Perdana Media, 2004), hlm. 215.

kebaikan.⁴ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵

Allah swt. berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah : 2/233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah:233)⁶

⁴ Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza, Fathul Qarib al-Mujib, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, t.t.), II, hlm. 96.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), X, hlm. 94.

⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Timbul, 1982), hlm. 57

Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ
عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَ لَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَ وَلَدِي
إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Menceritakan kepadaku Muhammad ibn al-Musanna. Menceritakan kepada kami dari Hisyam ia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku dari i ‘Aisyah sesungguhnya Hindun binti’Utbah berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberikan kepadaku apa yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah saw. bersabda: ambil lah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan atas wajibnya seorang ayah memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, dan istri berhak menerima nafkah secara syar’i itu boleh mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya (tanpa sepengetahuan suaminya) apabila tidak melampaui batas (kebutuhan). Dan hadis ini juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada istrinya itu menurut kadar kemampuan suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang adanya kewajiban nafkah orang tua terhadap anak yaitu dalam pasal 80 ayat 2 dan 4 yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang telah Allah swt. berikan, yang senantiasa kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat,

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁷ Ibaratnya seorang anak itu merupakan ladang yang harus dijaga oleh orang tuanya agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikannya, tidak memberikan hak-haknya, dan perhatiannya, maka akan terjadi kehancuran dan kerusakan, karena anak itu akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tua, masyarakat, serta lingkungannya.⁸

Pemberian nafkah kepada anak dari seorang ayah itu terdapat dua syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Anak tersebut berkeadaan fakir, tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika sang anak kaya, memiliki harta, dan memiliki pekerjaan, maka pemberian nafkah kepadanya tidak wajib, karena kewajiban menafkahi anak berlaku jika anak tersebut dalam keadaan fakir. Sedangkan anak yang kaya tidak perlu dinafkahi lagi.
2. Seorang ayah berkeadaan mampu memberikan nafkah, baik dari harta maupun usahanya. Apabila seorang ayah itu kaya dan ia mempunyai harta yang melebihi kebutuhannya atau mampu untuk berusaha dan bekerja, maka dia wajib menafkahi anak-anaknya.⁹

Pembahasan yang cukup penting untuk diketahui yaitu tentang batas waktu kewajiban orang tua menafkahi anak, sampai kapan orang tua wajib menafkahi anaknya. Kemudian ketika anak sudah baligh dan mampu

⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Pres, Cet. Ke-I, t.t), hlm 206.

⁹ *Ibid.*, hlm. 207

untuk bekerja apakah orang tua masih wajib untuk memberi nafkah kepadanya.

Syekh Ibrahim al-Baijuri dalam kitabnya *Hasyiyah al-Baijuri* berpendapat bahwa “Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat dipahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara’ dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk bekerja.”¹⁰

Dari penjelasan diatas Syekh Ibrahim al-Baijuri berpendapat bahwa salah satu alasan wajibnya menafkahi anak bagi orang tua adalah dikarenakan tidak mampunya anak dalam bekerja untuk menghasilkan uang. Ketika anak sudah beranjak baligh dan telah mampu untuk bekerja maka orang tua pada saat demikian sudah tidak wajib untuk menafkahnya, meskipun pada saat itu anaknya masih belum mendapatkan pekerjaan. Namun ketika anak dalam keadaan menuntut ilmu walaupun ia sudah baligh dan mampu bekerja anak tersebut tetap wajib dinafkahi.

¹⁰ Syekh Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, juz 2, hlm. 187

Sedangkan Imam Al-Mardawy berpendapat bahwa seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, akan tetapi mereka tidak memiliki harta dan pekerjaan, sehingga mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana Imam Al-Mardawy menuturkan pendapatnya dalam kitab *Al-Inshāf* yaitu “Wajib atas seseorang menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, dan hamba sahnya dengan cara yang baik, apabila mereka (dalam kondisi) miskin, dan wajib seseorang menafkahi mereka dari harta yang ia miliki. Begitu juga, wajib menafkahi “seluruh ayahnya (dan garis keturunan) ke atas, dan keturunannya (anak-anaknya dan seterusnya) ke bawah”.¹¹

Pendapat Imam Al-Mardawy tersebut menyebutkan bahwa orang tua itu masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anaknya tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja, akan tetapi anak tersebut berkeadaan miskin. Sehingga dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Mardawy bahwa kondisi seorang anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan anak tersebut dalam keadaan miskin maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Imam Al-Mardawy menjadikan miskin sebagai syarat, bahwa orang tua itu masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat,

¹¹ ‘Alāuddin Abū al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardāwy al-Hanbaly, *Al-Inshāf*, (t.t, Dāru lhya’ al-Turats al-‘Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), hlm. 392.

dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan miskin) bukanlah menjadi halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap salah satu Ulama yang juga beliau adalah salah satu penceramah dan juga khatib di beberapa mesjid di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beliau berpendapat bahwasanya Orang tua wajib menafkahi anak-anaknya sampai anaknya tersebut baligh di tandai dengan haid (bagi perempuan) dan Mimpi (bagi laki-laki). Setelah anak-anaknya baligh maka ayahnya tidak memiliki tanggungjawab lagi untuk menafkahi kecuali ayahnya berkenan menafkahi mereka secara sukarela.

Perbedaan beberapa pendapat Ulama diatas dalam menentukan nafkah anak yang sudah *baligh* atau yang sudah dewasa, menjadi perhatian penulis untuk membahasnya. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pendapat Ulama lainnya beserta dasar dan alasan yang dikemukakan masing-masing Ulama tersebut. Maka peran Ulama dalam memberikan pendapat yang mereka kemukakan mempunyai dasar yang signifikan dalam dinamika sosial, oleh karena itu penulis menganggap ini penting untuk ditelusuri dan menjelaskan masing-masing pendapat Ulama mengenai kasus yang sedang dibahas.

Penulis akan tuangkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu memperjelas rumusan pokok masalah yang akan diteliti, maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa?
2. Apa alasan yang mendasari pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.
2. Untuk mengetahui apa alasan yang mendasari pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sebagai informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa

2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
4. Menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya atau pihak lain yang memerlukan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas serta menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu ada batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pendapat adalah pandangan seseorang berdasarkan rumusan asas yang menjadi hukum terhadap suatu permasalahan. Dalam hal ini pendapat hukum Ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan Islam. Adapun Ulama dalam penelitian ini adalah Ulama yang bertempat tinggal di kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a) Terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - b) Termasuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia di kabupaten Hulu Sungai Tengah

- c) Pimpinan atau pendidik di pondok pesantren.
 - d) Pimpinan majelis ta'lim atau pengajian agama.
3. Nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.
 4. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung.¹²
 5. Anak dewasa adalah anak yang sudah kawin atau anak yang sudah mampu untuk berdiri sendiri (tidak bergantung dengan orang lain). Adapun pengertian dewasa di dalam tulisan ini penulis mengambil pengertian yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 45 Ayat 2 yaitu : “anak itu sudah dewasa apabila sudah kawin atau dapat berdiri sendiri”. Dalam ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban orang tua yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri. Adapun maksud dari kata “dapat berdiri sendiri” adalah anak sudah mampu untuk tidak bergantung dengan orang tuanya lagi.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah:

1. Jurnal Ilmiah Islam, Futura Marwan Mahasiswa program pasca sarjana IAIN Al-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 yang berjudul “*Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari’ah*”. Dalam penelitian ini

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990. hlm.269

lebih membahas kepada batas usia anak menerima nafkah berdasarkan Maqasid Syariah. Bagaimana batas seorang anak menerima nafkah dari orangtuanya menurut pandangan Maqasid Syariah. Sedangkan penelitian penulis sama membahas tentang nafkah orang tua kepada anak namun lebih mengkhususkan tentang pendapat Ulama tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa. Bagaimana pendapat Ulama tentang nafkah orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa apakah masih wajib atau tidak wajib lagi.

2. Skripsi yang disusun oleh Mochammad Imam Fauzi NIM. 110710101103 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul "KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)". Dalam penelitian ini lebih membahas kepada pertanggung jawaban orang tua pasca bercerai terhadap nafkah anaknya. Apakah orang tua tersebut wajib menafkahi anaknya meskipun mereka sudah bercerai. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang apakah anak yang sudah dewasa dan mampu bekerja orang tua masih wajib untuk menafkahi anak tersebut atau tidak.
3. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Mukharis NIM. 1423201005 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tahun 2018 dengan judul "KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM". Dalam skripsi tersebut membahas tentang pandangan mazhab

Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban orang tua menafkahi anak, bagaimana persamaan dan perbedaan antara keduanya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang nafkah orang tua kepada anak dewasa menurut pendapat Ulama.

4. Skripsi yang disusun oleh Okta Vinna Abri Yanti NIM. 13101773 Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Metro Tahun 2017. "HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi ini membahas tentang kasus suami yang melalaikan hak nafkah istri dan anaknya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa menurut pendapat Ulama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua ini kedalam 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, Adapun sistematika penulisan penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian definisi operasional untuk memudahkan

memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang di inginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya atau penelitian dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari penelitian ini.

BAB II, berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-maalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III, menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV: Merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, identitas informan, pembahasan hasil penelitian, dan analisis.

BAB V, merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan berisikan simpulan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti sedangkan saran yang bersifat masukan.